

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan *middle power* diplomacy dengan menggunakan dua instrumen utama, yaitu multilateralisme dan kerja sama *niche*. Melalui forum ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM), Indonesia mendorong inisiatif kerja sama trilateral maritim dengan Malaysia dan Filipina sebagai respons terhadap ancaman terorisme Abu Sayyaf di wilayah Selat Sulu. Upaya ini menunjukkan bagaimana negara *middle power* dapat bertindak sebagai inisiator keamanan kawasan tanpa bergantung pada kekuatan besar, melainkan melalui diplomasi kolektif yang berbasis kebutuhan lokal.

Melalui instrumen multilateralisme, Indonesia berhasil mentransformasikan forum ADMM menjadi wadah pembentukan konsensus trilateral dan menghasilkan Joint Declaration pada 2016 yang kemudian menjadi dasar bagi kerja sama *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) dan *Trilateral Air Patrol* (TAP). Indonesia tidak hanya menampilkan karakteristik *behavioral* dan fungsional *middle power*, tetapi juga mengaplikasikan nilai *good international citizenship*. Kemudian dalam konteks kerja sama *niche*, implementasi INDOMALPHI mencerminkan kerja sama spesifik yang dibentuk secara *ad hoc* berdasarkan isu aktual, yaitu ancaman pembajakan dan penculikan di Selat Sulu. Kegiatan operasional yang dijalankan seperti pelatihan militer bersama, patroli laut dan udara, *port visit*, serta

pembentukan *Maritime Command Center* (MCC) memperlihatkan bahwa kerja sama ini tidak bersifat simbolik, melainkan memiliki dampak nyata terhadap penurunan jumlah insiden kejahatan maritim di kawasan. Bahkan, sejak tahun 2021 hingga 2024, tidak tercatat lagi kasus pembajakan dan penculikan di Laut Sulu menurut data ReCAAP.

Secara strategis, kerja sama ini tidak hanya berhasil menjaga stabilitas kawasan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai *middle power* yang aktif, responsif, dan kredibel. Kesuksesan ini mendapat perhatian dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia, serta mendorong keterlibatan negara-negara lain seperti Singapura dan Brunei sebagai observer. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama INDOMALPHI telah berkembang dari inisiatif *ad hoc* menjadi bentuk mini-multilateralisme yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lanskap keamanan Indo-Pasifik. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan serius, seperti perselisihan wilayah antara Malaysia dan Filipina, keterbatasan interoperabilitas teknologi, serta hambatan hukum yang menghalangi implementasi penuh dari mekanisme hot pursuit. Oleh karena itu, keberlanjutan kerja sama ini akan sangat ditentukan oleh upaya kolektif ketiga negara untuk menyinkronkan aspek legal, teknis, dan diplomatik secara menyeluruh.

Implementasi *middle power* diplomacy Indonesia dalam kerja sama INDOMALPHI telah berhasil mewujudkan stabilitas keamanan maritim di kawasan Selat Sulu dan menunjukkan bahwa kerja sama maritim regional berbasis multilateralisme dan kerja sama *niche* merupakan strategi efektif bagi negara-

negara menengah untuk mengatasi ancaman keamanan non-tradisional. Model kerja sama ini layak dikembangkan lebih lanjut, tidak hanya sebagai respons taktis, tetapi juga sebagai fondasi jangka panjang bagi arsitektur keamanan maritim regional yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **4.2 Saran**

Penulis menyadari bahwa kajian mengenai diplomasi *middle power* dalam konteks kerja sama keamanan masih memiliki ruang yang luas untuk dieksplorasi, terutama di kawasan Asia Tenggara yang tengah menghadapi dinamika geopolitik dan keamanan yang kompleks. Sehingga penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya lebih mengulas kajian diplomasi *middle power* untuk dapat memperluas fokus analisisnya pada faktor kawasan dan bentuk kerja sama. Serta penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan diplomasi *middle power* Indonesia dengan negara lain seperti Korea Selatan atau Australia, termasuk pada isu non-keamanan seperti perubahan iklim dan ekonomi biru.